

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HakAsasi Manusia

Pengarah

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan HakAsasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HakAsasi Manusia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum

Ahyar, S.H., M.H. (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Pemimpin Redaksi (Editor)

Ahyar, S.H., M.H.

Anggota Dewan Redaksi (Section Editor)

Marulak Pardede, S.H., M.H.
Mosgan Situmorang, S.H., M.H.
Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H.
Nevey Várida Ariani, SH., M.Hum.
Dr. Hardianto Djanggih, S.H, M.H.
Muhaimin, S.H.

Redaksi Pelaksana

Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris

Muhammad Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Dra. Evy Djuniarti, M.H.
Ibnu Prasetyo, S.H.

Penyunting Tata Bahasa dan Naskah (Copyeditor)

Lindung Budi Mulyawan, S.H.
B Lora Christyanti, S.IP.
Amirah Balqis, S.H.
Ardyan Gilang Ramadhan, S.Sos.
Maria Lusyana Br Ginting, S.A.P.

Teknologi Sistem Informasi

Machyudhie, S.T.

Mochamad Arip, S.Kom.

Harysandy Permana, S.Kom.

Agus Priyatna, S.Kom.

MitraBestari (Reviewer)

1. Dr. Mohd. Din
Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh, Indonesia
2. Dr. Hadi Supratikta, M.M.
Pakar Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan Badan
Litbang Kementerian Dalam Negeri, Indonesia
3. Dr. Farhana Farhana, S.H., M.A., M.Pd.
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Indonesia
4. Prof. Dr. Rianto Adi, M.A.
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Indonesia
5. Prof. Dr. Hibnu Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email:

balitbangkumham@gmail.com

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang di muat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap di *submit* pada aplikasi *Open Journal System (OJS)* pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
ADVERTORIAL	v
KUMPULAN ABSTRAK	vii
Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat kepada Tahanan Perang Afganistan <i>(International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan)</i>	153 - 164
Fikry Latukau	
Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan <i>(The Secondary Function of Criminal Law in Combating Tax Crime)</i>	165 - 176
Yoserwan	
Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial <i>(Criminal Liability For Hate Speech Actors In Social Media)</i>	177 - 188
Ferry Irawan Febriansyah; Halda Septiana Purwinarto	
Mekanisme Penerapan Intervensi Kemanusiaan dalam Hukum Nasional Indonesia <i>(The Mechanism of Implementation of Humanitarian Intervention in The Perspective of National Law of Indonesia)</i>	189 - 204
Hilmi Ardani Nasution; Nurangga Firmanditya	
Relasi Aspek Sosial dan Budaya dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia <i>(Relationship of Social and Cultural Aspects with Politics of Law on Direct Regional Head Election in Indonesia)</i>	205 - 220
Muhammad Yusrizal Adi Syaputra; Eka N.A.M. Sihombing	
Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia <i>(Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)</i> <i>(Disharmonic Regulation of Laws in The Field of Supervision in Indonesia)</i> <i>(Cross History from Colonial Law to National Law)</i>	221 - 232
Taufik H. Simatupang	

De Jure

Urgensi Omnibus Law dalam Percepatan Reformasi Regulasi
dalam Perspektif Hukum Progresif
(*The Urgency of Omnibus Law to Accelerate Regulatory Reform
in The Perspective of Progressive Law*)..... 233 - 244

Eko Noer Kristiyanto

Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan
Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum
(*Policy Implementation Proposing Construction Village to become Village Aware of Law*) 245 - 258

Oksimana Darmawan; Okky Chahyo Nugroho

Implementasi Hukum Pers Di Sumatera Utara
(*Implementation of Press Law in North Sumatera*) 259 - 274

Dedi Sahputra

Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu
(*The Assignment of Suspects Has No Time Limit*)..... 275 - 288

Muhaimin

BIODATA PENULIS

PEDOMAN PENULISAN

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Allah SWT, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bisa kembali menerbitkan Volume 20 Nomor 2 Juni 2020.

Penerbitan-penerbitan Jurnal Penelitian hukum De Jure Volume 20 Nomor 2 Juni 2020 ini, akan memuat 10 (Sepuluh) tulisan) dari berbagai Institusi Lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Seiring adanya pandemi global virus corona yang belum mereda, kehidupan harus terus berjalan sehingga dunia harus memasuki fase yang disebut New Normal. Hal itu tentu saja juga berlaku di Indonesia, karena tidak ada yang bisa memastikan apakah kita akan kembali ke fase sebelum Covid-19 muncul. New Normal adalah perubahan perilaku dengan tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambahkan penerapan protokol Covid-19 secara ketat guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 atau dapat dikatakan bahwa *New Normal* adalah berdamai dengan Covid-19. Praktek Perkembangan Teknologi Informasi menjadi poin penting dari perubahan transformasi sosial, termasuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, redaksi Jurnal Penelitian De Jure dalam Volume 20 Nomor 2, Juni 2020, mengangkat tulisan diantaranya Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat kepada Tahanan Perang Afganistan, Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan, Mekanisme Penerapan Intervensi Kemanusiaan dalam Hukum Nasional Indonesia, Urgensi Omnibus Law dalam Percepatan Reformasi Regulasi dalam Perspektif Hukum Progresif.

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan hasil karyanya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan dalam penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Redaksi,
Jakarta, Juni 2020

HALAMAN KOSONG

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Fikry Latukau

International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan

Law Research Journal De Jure, 2020 June; Volume 20, Number 2, Page 153-164

The US military tortured Afghan prisoners of war with interrogation techniques and violently raped prisoners of war in Afghanistan, violating international warfare law. The purpose of this study is to analyze how the enforcement of international criminal law against torture cases committed by the United States military against prisoners of war in Afghanistan. Normative juridical research methods analyzed qualitatively and presented descriptively analytically. The results showed that the US military could be carried to the ICC, because of interrogation crimes using abusive techniques, torture, and the treatment of biological experiments on prisoners of war carried out in Afghanistan (state parties). It applies to perpetrators of crimes from any country, be it a state party or not. In conclusion, the US military can be carried to the ICC, because the ICC has jurisdiction over several serious crimes, including war crimes. The Suggestion that war crimes are an unforgivable thing, especially torturing prisoners of war who have rights and obligations according to the 1949 Vienna convention should the criminals who do so are immediately arrested and punished. Then it would also be possible to form a special regulation governing prisoners of war who were the object of violence.

Keywords: ICC jurisdiction; international criminal court; non-state party

Yoserwan

The Secondary Function of Criminal Law in Combating Tax Crime

Law Research Journal De Jure, 2020 June; Volume 20, Number 2, Page 165-176

The tax is an important role for state finances. Through taxation reforms, Indonesia has reformed tax laws and strengthened with administrative and criminal sanctions. This paper examines how the form of tax crime and how the secondary function of criminal law in settling tax crime. The study conducted using the normative legal research method by studying and analyzing tax laws. The result shows that tax crimes toward taxpayers, tax officials or tax-related parties such as tax consultants. The sanction for tax crime prioritizes fines and double the penalties. Regulation of the secondary function criminal law is reflected from the possibility case adjunctions in the form of cessation of investigations, as long as the state losses have been recovered by paying the tax liability under its penalty. Therefore, the settlement of tax crime must always prioritize the interests of state revenues, through the application of administrative sanction instead of criminal sanction. Settlement through the criminal justice system will only take place if state losses cannot be recovered. Therefore, if state losses cannot be recovered, settlement through criminal justice must be carried out to guarantee the enforcement of taxation law and taxpayer compliance

Keywords: secondary function of criminal law; tax law; tax crime

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ferry Irawan Febriansyah; Halda Septiana Purwinarto

Criminal Liability For Hate Speech Actors In Social Media

Law Research Journal De Jure, 2020 June; Volume 20, Number 2, Page 177-188

Social media is part of the needs of the Indonesian people that can not be separated again in line with the times. All public behaviour, including social media, is regulated by law. Many people who abuse social media to use hate speech in cyberspace, without realizing that their actions are illegal. The purpose of this study is to determine criminal liability for hate speech actors on social media. This study uses empirical legal research methods in which the law looks at social phenomena in the community to find solutions to existing legal problems then linked to laws and regulations. The results of the study found that many Indonesian people who use social media to use hate speech. It happens because they do not understand the existing law. However, mistakes and omissions are individuals responsibility as legal subjects. Suggestions that can be submitted are reforming the ITE law, socialization to the public by law enforcement related to education and law enforcement and the community itself should be smarter in using social media.

Keywords: social media; hate speech; criminal liability

Hilmi Ardani Nasution; Nurangga Firmanditya

***The Mechanism of Implementation of Humanitarian Intervention
in The Perspective of National Law of Indonesia***

Law Research Journal De Jure, 2020 June; Volume 20, Number 2, Page 189-204

Humanitarian intervention is an act of a state by using military force, intervening another state's sovereignty to prevent and stop crimes against humanity which occur in that state. Humanitarian intervention has become a controversy in the international community regarding the legality of its implementation because in its history of humanitarian intervention was carried out by a state or group of countries in different ways. Humanitarian intervention from one side is a way to stop the serious human rights violations that occurred in one state, but on the other hand humanitarian intervention is seen as a tool for superpowers to interfere the sovereignty of other states. Indonesia before and after independence, had experienced various types of intervention by other countries. Particularly Indonesia had also intervened the sovereignty of other states. This paper discusses how the mechanism for the implementation of humanitarian intervention in Indonesia based on the prevailing laws and regulations, and also as a reference for the government

Keywords: international human rights law; humanitarian intervention; state sovereignty

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra; Eka N.A.M. Sihombing

Relationship of Social and Cultural Aspects with Politics of Law on Direct Regional Head Election in Indonesia

Law Research Journal De Jure, 2020 June; Volume 20, Number 2, Page 205-220

Regional head elections in some areas where the community is homogeneous or heterogeneous tend to trigger social conflict. Besides, the implementation of the direct election of regional heads is also considered to spend much budget. This study aims to conduct a study of the relationship between Direct Local Election with social and cultural aspects of the community in the region and to examine the legal politics of the future elections. The research method in this study is normative juridical. The results of this study indicate that first, there is a link between the implementation of the Direct Local Election with Social and Cultural Aspects which shows that both the government and local communities in Indonesia are not ready to implement direct elections. Because both in terms of structure, substance, and legal culture in direct elections in Indonesia there are still many shortcomings. Secondly, that the legal politics of organizing future elections can be corrected because it has shortcomings.

Keywords: socio and cultural aspects; regional head; local election

Taufik H. Simatupang

Disharmonic Regulation of Laws in The Field of Supervision in Indonesia

(Cross History from Colonial Law to National Law)

Law Research Journal De Jure, 2020 June; Volume 20, Number 2, Page 221-232

In Article 366 of the Civil Code it is stated that in each guardianship ordered in it, the Balai Harta Peninggalan assigned as a guardianship supervisor. However, its existence is quiet in the middle of the crowd of the times, especially related to family law and wealth. The problem of this research is how the authority of the Balai Harta Peninggalan supervises guardianship in the framework of national legal politics, to answer whether that authority is still existing. The research method used is a normative juridical research method using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study indicate that guardianship oversight must continue to carried out because the Marriage Law has not explicitly governed it. Including the material normalization of Indonesian Citizens and Foreign Citizens, as referred to in the Citizenship Act and the Population Administration System Act does not necessarily remove Article 366 of the Civil Code, in the historical context, regulating the classification of the population in Indonesia. Therefore, in the framework of national legal politics, Indonesia needs to reform marital law, specifically to regulating guardianship supervision adjusted to the times changing.

Keywords: disharmonic; guardianship supervision; cross history

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Eko Noer Kristiyanto

The Urgency of Omnibus Law to Accelerate Regulatory Reform in The Perspective of Progressive Law
Law Research Journal De Jure, 2020 June; Volume 20, Number 2, Page 233-244

The problem that obstacles the success of government programs, one of them is overlapping regulations. A breakthrough is needed to fix the regulatory problem in Indonesia, and the omnibus law is considered as one of the relevant solutions. This study intends to explain the relevance of progressive law to Omnibus Law in the context of regulatory reform through a normative juridical approach by describing principles and principles that are in harmony between the two. It turns out that the omnibus law is very capable of being applied in Indonesia because it is not contradicting to the law and suitable for the needs of the community. Breakthrough through the omnibus law is suitable with progressive legal concepts oriented to human interests. The key is that the process of forming an omnibus law must pay attention to the public.

Keywords: omnibus law; progressive; reform; regulation; participation

Oksimana Darmawan; Okky Chahyo Nugroho

Policy Implementation Proposing Construction Village to become Village Aware of Law

Law Research Journal De Jure, 2020 June; Volume 20, Number 2, Page 245-258

Since the Circular Letter of the Head of BPHN No. PHN-5.HN.04.04 of 2017 concerning Amendment to the Assessment Criteria of the Village Aware of Law, construction village (CV) that are determined to be the legal aware village (LAV) must obtain values with high awareness. However, data on the number of crimes and crime rates in DKI Jakarta and West Java Provinces are very high. Evaluative research is needed to analyze this policy. The purpose of this study was to determine and analyze the proposed CV to become LAV. The research method is juridical-empirical with a legal theory perspective analysis. Data used are secondary (literature), and primary data (interviews). The results showed that proposing CV to become LAV still found an impression of formality, like just socializing how to fill out the village awareness index questionnaire, so that it affects the quality of the formation of LAV. It is suggested that BPHN should make operational guidelines, both in quality and quantity related to the guidance material for law-aware families and CV apparatus so that the process of establishing a law-aware village obtains responsible quality (not formality).

Keywords: construction village; legal aware village

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Dedi Sahputra

Implementation of Press Law in North Sumatera

Law Research Journal De Jure, 2020 June; Volume 20, Number 2, Page 259-274

A healthy press climate is one of the conditions for creating a better press role in the sustainability of democracy. Enforcement of the Press Law is a strategic way to create a healthy press climate. This research is formal juridical law research that uses a descriptive-analytical approach. This study found that the Press Law in force in Indonesia continued to develop from time to time. The three laws that govern the national press today are Act No.40 of 1999 concerning the Press, Act No.32 of 2002 concerning Broadcasting, and Act No.11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children which is then derived in the form of guidelines and regulations for the national press in carrying out their duties. Whereas the implementation of the press law in legal cases involving journalists and or press institutions that produce journalistic works/products in North Sumatera is effective. However, the implementation of the Press Law side by side with implementing a legal product in the form of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) and the Criminal Law Code (KUHP).

Keywords: implementation; press law; journalistic product

Muhaimin

The Assignment of Suspects Has No Time Limit

Law Research Journal De Jure, 2020 June; Volume 20, Number 2, Page 275-288

Often between legal certainty clashes with justice, often between legal certainty with expediency. The age of the Criminal Procedure Code which has been fifty years old, revealed various weaknesses in the implementation of the criminal justice system (criminal justice system) in Indonesia. Because the Criminal Procedure Code which normatively constitutes the legal basis for the implementation of the criminal justice system, can no longer be regarded as the great work of the Indonesian Nation. Weaknesses include the imbalance of rights between the suspect/defendant rights and the rights of the victim, resulting in a weak position of the victim. The components that work within the criminal justice system in this state of law are state institutions that have tarnished their authority. Starting from police institutions, prosecutors to the judiciary, involved in the practice of abuse of power, as well as various types of criminal acts. The formulation of the problem in this research is how to protect human rights in criminal law and what is the role of the National Police as Investigators? Using normative juridical research methods, then the use of the statutory approach is a sure thing. KUHP as a standard and mechanism for controlling discretion of law enforcers has not been able to protect the rights of suspects, defendants and convicted persons. The judiciary generally does not provide legal protection for the human rights of the suspect. The decision of the pretrial institution is only limited to illegal arrest and detention. The suspect remains a suspect, even his status is without legal basis due to the unlimited discretion of the police and prosecutors.

Keywords: human rights protection; the role of polri; investigator

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Fikry Latukau (Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung)****Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 153-164

Militer Amerika Serikat melakukan penyiksaan terhadap tahanan perang Afganistan dengan teknik interogasi secara kasar dan memperkosa tahanan perang di Afganistan, tentunya ini sangat melanggar ketentuan hukum yaitu ketentuan hukum humaniter internasional. Tujuan penelitian ini untuk melihat serta melakukan analisis mengenai bagaimanakah penegakan hukum pidana internasional terhadap kasus penyiksaan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap tahanan perang Afghanistan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan militer Amerika dapat dibawa ke ICC, karena kejahatan interogasi menggunakan teknik kasar, penyiksaan, dan perlakuan eksperimen biologis pada tahanan perang yang dilakukan di wilayah Afganistan sebagai (negara pihak). Ini berlaku bagi para pelaku kejahatan dari negara mana pun, baik negara pihak atau non pihak. Kesimpulannya militer Amerika dapat diadili di ICC, dikarenakan ICC mempunyai yuridiksi terhadap beberapa kejahatan yang dianggap serius termasuk kejahatan perang. Saran dari tulisan ini bahwa kejahatan perang adalah suatu hal yang tidak dapat dimaafkan, terutama menyiksa tahanan perang yang sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban menurut konvensi wina III 1949, maka, seharusnya para penjahat perang yang melakukan hal ini segera ditangkap dan dihukum. Kemudian kiranya juga dapat membentuk suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai tahanan perang yang dijadikan objek kekerasan.

Kata Kunci: yuridiksi ICC; pengadilan pidana internasional; negara non-pihak**Yoserwan (Fakultas Hukum Universitas Andalas)****Fungsi Sekunder Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 165-176

Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi keuangan negara. Melalui reformasi perpajakan, Indonesia melakukan pembaruan hukum pajak yang diperkuat dengan sanksi administratif dan pidana. Untuk mengoptimalkan pemasukan keuangan negara melalui pajak, penyelesaian pelanggaran hukum pajak lebih mengedepankan penyelesaian secara administratif, dari pada melalui sistem peradilan pidana. Tulisan ini mengkaji bagaiman wujud tindak pidana perpajakan dan bagaimana pengaturan fungsi sekunder hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan ditujukan baik kepada wajib pajak, petugas pajak atau pihak terkait dengan pajak seperti konsultan pajak. Sanksi pidana perpajakan yang lebih mengedepankan denda serta dengan melipatgandakan dendanya. Pengaturan fungsi sekunder hukum pidana tercermin dari dimungkinkannya penyimpangan perkara berupa penghentian penyidikan, sepanjang kerugian negara telah dipulihkan dengan membayar kewajiban pajak disertai dendanya. Oleh sebab itu, penyelesaian tindak pidana perpajakan harus tetap lebih mengedepankan kepentingan pemasukan keuangan negara, melalui penyimpangan perkara serta penerapan sanksi administratif. Penyelesaian melalui peradilan pidana baru dilaksanakan apabila kerugian negara tidak dapat dipulihkan. Dengan demikian bila kerugian negara tidak dapat dipulihkan, penyelesaian melalui peradilan pidana harus tetap dilaksanakan untuk menjamin menegakan hukum perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: fungsi sekunder hukum pidana; hukum pajak; tindak pidana perpajakan

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Ferry Irawan Febriansyah; Halda Septiana Purwinarto (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 177-188

Media sosial merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan lagi seiring dengan kemajuan zaman. Semua perilaku masyarakat termasuk media sosial diatur oleh hukum. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian di dunia maya yang tanpa mereka sadari bahwa perbuatannya adalah pelanggaran hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana hukum melihat gejala sosial di masyarakat untuk menemukan solusi dari masalah hukum yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ditemukan banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial dengan melakukan ujaran kebencian. Hal ini terjadi karena mereka belum paham terhadap undang-undang yang ada. Akan tetapi kesalahan maupun kealpaan tetap menjadi tanggung jawab individu sebagai subyek hukum. Saran yang dapat diajukan adalah pembenahan undang-undang ITE, sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum terkait edukasi dan penegakan hukum serta masyarakat sendiri seyogyanya lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

Kata kunci: media sosial; ujaran kebencian; pertanggungjawaban pidana

Hilmi Ardani Nasution; Nurangga Firmanditya (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Mekanisme Penerapan Intervensi Kemanusiaan dalam Hukum Nasional Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 189-204

Intervensi kemanusiaan adalah merupakan tindakan suatu negara dengan menggunakan kekuatan militer, melakukan intervensi kedaulatan negara lain dengan tujuan untuk mencegah dan menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negara tersebut. Intervensi Kemanusiaan menjadi sebuah perdebatan di dunia internasional terkait legalitas pelaksanaannya, karena dalam sejarahnya Intervensi Kemanusiaan dilakukan oleh sebuah negara atau sekelompok negara dengan cara yang berbeda-beda. Intervensi Kemanusiaan dari satu sisi merupakan sebuah cara untuk menghentikan pelanggaran berat hak asasi manusia yang sedang terjadi di sebuah negara, namun di sisi lain Intervensi Kemanusiaan dipandang sebagai alat bagi negara adidaya untuk mencampuri kedaulatan negara lain. Bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan telah merasakan berbagai jenis intervensi negara lain, dan khususnya Indonesia juga sudah pernah melakukan tindakan intervensi kepada kedaulatan negara lain. Tulisan ini membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan luar negeri terutama terkait Intervensi Kemanusiaan.

Kata kunci: hukum hak asasi manusia internasional; intervensi kemanusiaan; kedaulatan negara

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Muhammad Yusrizal Adi Syaputra (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan)****Eka N.A.M. Sihombing (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan)****Relasi Aspek Sosial Dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 205-220

Pemilihan kepala daerah di beberapa daerah yang masyarakatnya bersifat homogen maupun heterogen cenderung memicu konflik sosial. Selain itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung juga dinilai menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap keterkaitan Pilkada Langsung dengan aspek sosial budaya masyarakat di daerah dan untuk mengkaji politik hukum penyelenggaraan Pilkada dimasa depan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, adanya keterkaitan pelaksanaan Pilkada Langsung dengan aspek sosial budaya yang memperlihatkan baik pemerintah dan masyarakat daerah di Indonesia belum siap untuk melaksanakan Pilkada langsung. Hal ini dikarenakan baik secara struktur, substansi maupun budaya hukum di pilkada langsung di Indonesia masihlah terdapat banyak kekurangan. Kedua, bahwa politik hukum penyelenggaraan Pilkada di masa depan dapat dilakukan koreksi karena masih memiliki kekurangan.

Kata kunci: aspek sosial dan budaya; kepala daerah; pilkada**Taufik H. Simatupang (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)****Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 221-232

Dalam Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. Namun demikian, keberadaannya sunyi di tengah keramaian perkembangan zaman, khususnya terkait hukum keluarga dan harta kekayaan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Balai Harta Peninggalan melakukan pengawasan perwalian dalam kerangka politik hukum nasional, dengan tujuan untuk menjawab apakah kewenangan itu masih ada atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif memakai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan perwalian harus tetap dijalankan karena Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya secara tegas. Termasuk penormaan materil Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Sistem Administrasi Kependudukan tidak serta merta menghapus Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam konteks sejarah, mengatur penggolongan penduduk di Indonesia. Oleh karena itu dalam kerangka politik hukum nasional, Indonesia perlu melakukan pembaharuan hukum perkawinan, dengan mengatur secara khusus tentang pengawasan perwalian yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kata kunci: disharmoni; pengawasan perwalian; lintas sejarah

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Eko Noer Kristiyanto (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Urgensi Omnibus Law dalam Percepatan Reformasi Regulasi dalam Perspektif Hukum Progresif

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 233-244

Persoalan yang menghambat keberhasilan program pemerintah selama ini, salah satunya adalah regulasi yang tumpang tindih. Diperlukan suatu terobosan untuk membenahi persoalan regulasi di Indonesia, dan omnibus law dianggap sebagai salah satu solusi yang relevan. Penelitian ini bermaksud menjelaskan relevansi hukum progresif dengan omnibus law dalam konteks reformasi regulasi melalui pendekatan yuridis normatif dengan menjabarkan prinsip dan asas yang selaras antara keduanya. Ternyata omnibus law sangat bisa untuk diterapkan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan undang-undang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terobosan melalui omnibus law ternyata sesuai dengan konsep hukum progresif yang berorientasi kepada kepentingan manusia. Kuncinya adalah bahwa proses pembentukan omnibus law harus benar-benar memperhatikan partisipasi publik.

Kata kunci: hukum omnibus; progresif; reformasi; regulasi; partisipasi

Oksimana Darmawan; Okky Chahyo Nugroho (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 245-258

Sejak adanya kebijakan Surat Edaran Kepala BPHN No. PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH), desa/kelurahan binaan (DB) yang ditetapkan menjadi DSH harus memperoleh nilai dengan kesadaran tinggi, tetapi dari data awal ditemukan jumlah kejahatan dan tingkat kejahatan sangat tinggi, terutama di kedua lokasi penelitian, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian evaluatif untuk menganalisis kebijakan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengusulan DB sampai menjadi DSH. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris yang dianalisa berdasarkan perspektif teori hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur, dan data primer melalui wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan pengusulan DB sampai menjadi DSH masih ditemukan adanya kesan formalitas, seperti pembinaan di DB hanya sebatas pada sosialisasi cara pengisian kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum, sehingga berpengaruh kepada kualitas pembentukan DSH. Disarankan agar BPHN membuat juklak/junis, baik dalam kualitas dan kuantitas terkait dengan materi pembinaan untuk keluarga sadar hukum (kadarkum) dan aparat desa/kelurahan binaan, agar proses penetapan desa sadar hukum memperoleh kualitas yang bertanggung jawab (bukan formalitas).

Kata kunci: desa binaan; desa sadar hukum

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Dedi Sahputra (Universitas Medan Area, Medan)****Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 259-274

Iklim pers yang sehat merupakan salah satu syarat bagi terciptanya peran pers yang semakin baik bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air. Penegakan Hukum Pers adalah cara yang strategis dalam menciptakan iklim pers yang sehat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis formal yang menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan hasil bahwa Hukum Pers yang berlaku di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Tiga undang-undang yang mengatur pers nasional saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian diturunkan dalam bentuk pedoman dan peraturan bagi pers nasional dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan pengimplementasian hukum pers dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan wartawan dan atau lembaga pers yang menghasilkan karya/produk jurnalistik di Sumatera Utara berlangsung efektif. Namun pengimplementasian Hukum Pers tersebut bersisian dengan mengimplementasikan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: implementasi; hukum pers; produk jurnalistik**Muhaimin (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta)****Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 2, Juni 2020, Halaman 275-288

Seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, seringkali antara kepastian hukum dengan kemanfaatan. Usia KUHP yang sudah lima puluh tahun ini, terungkap berbagai kelemahan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Karena KUHP yang secara normatif merupakan pijakan hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana, tidak dapat lagi dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia. Kelemahan itu, di antaranya ketidakseimbangan hak antara hak-hak tersangka/terdakwa dengan hak-hak korban, sehingga berakibat lemahnya posisi korban. Komponen yang bekerja di dalam sistem peradilan pidana di negara hukum ini, adalah institusi negara yang telah tercoreng kewibawaannya. Mulai insitusi kepolisian, kejaksaan sampai kehakiman, terlibat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan, maupun berbagai jenis tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana serta bagaimana peran Polri selaku penyidik? Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu hal yang pasti. KUHP sebagai standar dan mekanisme pengendalian diskresi aparat penegak hukum belum dapat melindungi hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana. Bahkan, lembaga peradilan secara umum tidak memberikan perlindungan hukum atas hak asasi tersangka. Putusan Lembaga Praperadilan hanya sebatas penangkapan dan penahanan tidak sah. Tersangka tetap menjadi tersangka, sekalipun statusnya tanpa alas hukum akibat hak diskresi polisi dan jaksa yang tanpa batas.

Kata Kunci: perlindungan ham peran polri; penyidik